

**PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA OLEH PARTAI POLITIK DI  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008  
TENTANG PARTAI POLITIK**

**Oleh : Sri Kemuning**

**Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Pembimbing I : Dr. Maria maya Lestari, SH.,MH.,Msc  
Pembimbing II : Zainul Akmal, SH.,MH  
Alamat : Jl. Banglas Selatpanjang  
Email : [srikemuning2210@gmail.com](mailto:srikemuning2210@gmail.com)**

**ABSTRACT**

*Political parties have a role in providing political education as stated in law number 2 of 2008 concerning political parties. Political education is very important for society, especially for beginner voters, considering that beginner voters are emotionally unstable and have minimal political knowledge.*

*This type of research is empirical (sociological), which uses empirical facts taken from KPU and high school data as well as interviews with political parties and first-time voters.*

*The problem that the author raises is how to provide political education for beginner voters in Meranti Islands Regency based on law number 2 of 2008, what are the supporting and inhibiting factors in providing political education for beginner voters in Meranti Islands Regency, and what efforts to increase community participation especially new voters in Meranti Islands Regency in politics.*

*The results of the research show that in Meranti Islands Regency political parties are said to not be running optimally and there are still shortcomings. It can be said that most of the political parties in the Meranti Islands Regency only focus on providing political education to cadres or internal party members without involving the community, especially first-time voters. The inhibiting factor for Political Parties in Kepulauan Meranti Regency in providing political education is the public's distrust of Political Parties, that when participating in political party events people think they will be said to be members of a Political Party. Lack of enthusiasm from the public. And several political parties said that there were no obstacles, but political education was not being implemented in the community. This means that there is a lack of understanding of Political Party administrators in their function and role in providing political education to the community. Author's suggestion: It is hoped that there will be an oversight institution for Political Parties in carrying out their roles and responsibilities to provide political education, and it is hoped that Political Parties can implement the rules, duties, functions and authority of Political Parties in providing political education in accordance with the updated Law Number 2 of 2008 again becomes Law Number 2 of 2011 concerning Political Parties. And it is hoped that there will be real action from political parties and the government, so that people are not anti-politics and it does not become a trust issue for political parties.*

**Keywords: novice voters, political parties, political education.**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Kepulauan Meranti adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia dengan ibu kotanya Selatpanjang. memiliki luas wilayah 3.707,84 km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk kabupaten ini berjumlah 206.116 jiwa.<sup>1</sup> Dikabupaten kepulauan meranti memiliki sekitar 3.272 pemilih pemula<sup>2</sup>, yang dimana mereka adalah remaja yang sudah berusia 17 tahun yang sudah cukup umur untuk mengikuti pemilu mendatang.

Pendidikan politik oleh partai politik kepada pemilih pemula sangat penting mengingat Pemilih pemula pada umumnya belum memiliki pengalaman dan pengetahuan seputar pemilihan umum. Sebagai generasi yang tumbuh pada era milenial, selalu menggunakan *smartphone*, dan aktif di media sosial, mereka kerap mendapatkan porsi informasi lebih banyak di media sosial. Dari sisi kurang mampunya mereka dalam memilah informasi yang banyak beredar di media sosial dan kurangnya pengalaman dalam melakukan literasi akan menyebabkan pemilih pemula ini menjadi pihak yang mudah terbawa arus informasi, dan dikhawatirkan akan menyebabkan mereka berpotensi menjadi *swing voters* atau terjebak dalam informasi-informasi yang bersifat *hoax*.<sup>3</sup>

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 31 ayat 1 disebutkan bahwa “Setiap warga

negara berhak mendapatkan pendidikan”<sup>4</sup> Partai Politik sebagai pilar demokrasi. Betapa pentingnya peran Partai Politik, maka sudah selayaknya jika Partai Politik diharapkan mampu menjadi demokratisasi yang sehat dan efektif.<sup>5</sup>

Pengaturan tentang Partai Politik berperan dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik pasal 11 ayat (1) a yang menyatakan :

“Bahwa peran Partai Politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”<sup>6</sup>

Dan pasal 13 (e) menyatakan bahwa partai politik berkewajiban untuk :

“melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya.”<sup>7</sup>

Peran Partai Politik bukan hanya sebagai organisasi politik tetapi juga menjadi organisasi yang memberikan pendidikan politik kepada masyarakat melalui pendidikan politik yang berlangsung dengan teratur dan sistematis. Sebuah negara yang demokratis dalam keberlangsungannya sebagai suatu negara yang menghormati hak dan kewajiban warga negaranya serta yang memberikan kesempatan bagi rakyatnya untuk berpartisipasi dalam bidang

---

<sup>1</sup> Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Kepulauan Meranti (Jiwa), 2021-2023<sup>3</sup>, *Badan Pusat Statistik*, 2023  
<<https://merantikab.bps.go.id/indicator/12/261/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-di-kabupaten-kepulauan-meranti.html>>.

<sup>2</sup> Data Sekolah Menengah Atas Diselatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti, anak usia 17 tahun (kelas 3) dari tahun 2019-2023

<sup>3</sup> Amir Syamsuadi, Menjadi Bijak Bagi Pemilih Pemula Berdasarkan Informasi Dari

Media Sosial Di Kabupaten Kepulauan Meranti, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin Volume 2 No. 2 Februari 2019*, Hlm. 1.

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>5</sup> Iyep Hermawan Dan Candra, Implementasi Pendidikan Politik Pada Partai Politik Di Indonesia, *Jurnal.Unsur.Ac.Id*, 2020, Hlm. 9.

<sup>6</sup> Undang – Undang Nomor. 02 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

<sup>7</sup> Ibid

politik, maka akan melakukan perubahan yang nyata kearah yang lebih baik disegala bidang yaitu lewat salah satunya adalah suksesi demokratis dan penempatan perwakilan-perwakilan rakyat untuk duduk didalam pemerintahan baik dieksekutif sebagai jabatan politik maupun dilembaga legislative yang dihasilkan melalui pemilihan umum.

Partai Politik sejatinya merupakan lembaga politik milik publik. sebab, *raison d'être* atau alasan mengadanya Partai Politik adalah melayani kepentingan umum dimana undang-undang Partai Politik, tujuan Partai Politik bersifat publik, yaitu memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>8</sup>

Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki 11 partai politik yang aktif diantaranya: PKB, Gerindra, PDI, Golkar, Nasdem, PKS, PPP, PAN, Hanura, Demokrat, dan PBB.<sup>9</sup> Kabupaten Kepulauan Meranti adalah kabupaten baru dan baru melakukan 3 kali penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (PILKADA) dan baru 2 kali melakukan pemilihan pemilu legislative (PILEG). Oleh karna itu sangat penting untuk mengetahui apakah partai politik sudah menjalankan perannya untuk memberikan Pendidikan politik sesuai dengan undang undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik. Pada penelitian ini memfokuskan Pendidikan politik diluar tahapan pemilu (kampanye).

## **B. Rumusan Masalah**

Kurangnya partisipasi partai politik dalam perannya untuk memberikan Pendidikan politik kepada pemilih pemula, mengingat Pemilih

pemula pada umumnya belum memiliki pengalaman dan pengetahuan seputar pemilihan umum.

Dari rumusan masalah tersebut dapat dibentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan undang- undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik ?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam memberikan pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kabupaten Kepulauan Meranti?
3. Apa upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terutama pemilih pemula di Kabupaten Kepulauan Meranti dalam politik?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tanggung jawab partai politik untuk memberikan pendidikan politik di Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai Peraturan Perundang-Undangan Nomor 02 Tahun 2020 tentang partai politik.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam memberikan pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kabupaten Kepulauan Meranti.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam politik

---

<sup>8</sup> Ppid Bappedda Prov. Jateng, 'Partai Sebagai Badan Publik', *Ppid Bappedda Provinsi Jawa Tengah*  
<<https://Ppid.Bappedda.Jatengprov.Go.Id/Partai-Sebagai-Badan-Publik/>>.

<sup>9</sup> Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Kepulauan Meranti (Jiwa), 2021-2023', *Badan Pusat Statistik*, 2023  
<<https://Merantikab.Bps.Go.Id/Indicator/12/261/1/Jumlah-Penduduk-Menurut-Kecamatan-Di-Kabupaten-Kepulauan-Meranti.Html>>.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Tanggung jawab

Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”<sup>10</sup>

Penelitian ini menggunakan teori tanggung jawab karna penelitian ini berkaitan dengan tanggung jawab partai politik dan Lembaga legislative yang merupakan *representative* dari partai politik untuk memberikan Pendidikan politik kepada masyarakat terkhusus pemilih pemula yang masi labil dan minim pengetahuan tentang pendidikan politik.

### 2. Teori utilitarisme

Konsep dasar dari Teori Utilitarianisme secara umum sangat sederhana, yaitu bagaimana memaksimalkan kedayagunaan (*utility*) dari suatu tindakan, sehingga dari proses tersebut kita dapat menikmati manfaat, keuntungan, kebahagiaan, dan kenikmatan (*benefit, advantage, pleasure, good, or happiness*)..<sup>11</sup>

Bahagia sederhananya adalah apa yang kita buat kepada orang lain bisa diterima oleh mereka. Mereka Bahagia dan kita pun merasakan kebahagiaan.

Adapun kaitan teori utilitarianisme dengan rumusan masalah, jeremi betham mengemukakan bahwa dasar yang

paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau sebaliknya, kerugian bagi orang-orang yang terkait. Bahwasanya Pendidikan politik yang diberikan oleh partai politik harus membawa kemanfaatan setiap orang, termasuk oleh pemilih pemula, yang pada umumnya belum memiliki pengalaman dan pengetahuan seputar pemilihan umum. Sehingga jika tidak diberikan Pendidikan politik kepada pemilih pemula maka akan menyebabkan generasi penerus bangsa buta akan Pendidikan politik.

### 3. Teori partisipasi

Partisipasi masyarakat menurut Hetifah Sj. Soemarto adalah “proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka”.<sup>12</sup>

Penelitian ini menggunakan teori partisipasi, karna menurut Hetifah Sj. Soemarto partisipasi Masyarakat adalah Masyarakat ikut serta dan berperan dalam proses, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan yang langsung mempengaruhi hidup mereka, termasuk juga dalam hal pemilu yang dimana Indonesia sebagai negara demokrasi yang memerlukan partisipasi masyarakat pemilu dianggap sebagai indikator utama negara demokrasi, karena dalam Pemilu rakyat menggunakan

---

<sup>10</sup> Vina Akfa Dyani, “Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte” Lex Reinansace, Yogja, VOL. 2 No. 1, Januari 2017, hlm. 166

<sup>11</sup>Ibid, Pratiwi, Negoro, And Haykal.

<sup>12</sup> Dewi Andriany, “Seminar Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (Snema) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang”, Available Online At [Http://Fe.Unp.Ac.Id/](http://Fe.Unp.Ac.Id/) Book Of Proceedings Published By (C), SNEMA-2015 Padang-Indonesia. Hlm. 31

suaranya, melaksanakan hak politiknya dan menentukan pilihannya secara langsung dan bebas.

### E. Metode Penelitian

#### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris (sosiologis) yang merupakan sebuah penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, perilaku tersebut bisa dihasilkan dari wawancara atau juga didapat dari perilaku yang nyata, dilakukan melalui pengamatan langsung oleh peneliti.<sup>13</sup>

#### 2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang akan menjadi obyek penelitian penulisan ini adalah: Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.

#### 3. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian.<sup>14</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

1. Pemilih Pemula
2. Partai Politik
3. Komisi Pemilihan Umum

#### b. Sampel

**Tabel 1.2**  
**Populasi dan Sampel**

No.	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Presentase (%)
1.	Pemilih pemula	3.272	200	6,5%
2.	Partai politik di kabupaten kepulauan meranti	11	7	60%
3.	Komisi pemilihan umum	1	1	100 %

#### 4. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden baik dari data sampel maupun informan dari penelitian. Bahan Hukum Primer adalah bahan – bahan hukum yang bersumber dari undang – undang dan terdiri dari:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik

##### 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara
2. Didukung oleh kajian kepustakaan
3. Observasi
4. Kuesioner

<sup>13</sup> Ryan, Cooper, And Tauer, 'No Title No Title No Title', *Paper Knowledge . Toward A Media History Of Documents*, 2013, 12–26.

<sup>14</sup> Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 98.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Partai Politik.**

Partai politik adalah salah satu komponen yang penting dalam dinamika perpolitikan sebuah bangsa. Partai politik dipandang sebagai salah satu cara seseorang atau sekelompok individu untuk meraih kekuasaan. Argumen seperti ini sudah biasa kita dengar di berbagai media massa dan dalam seminar-seminar yang kita ikuti khususnya yang membahas tentang partai politik.<sup>15</sup>

#### **B. Tinjauan Umum Pendidikan Politik**

Menurut Kantaprawira (2004), pendidikan politik yaitu untuk meningkatkan pengetahuan rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Sesuai paham kedaulatan rakyat atau demokrasi, rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi. Bentuk-bentuk pendidikan politik dapat dilakukan melalui:

1. Bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, dan lainlain bentuk publikasi massa yang biasa membentuk pendapat umum;
2. Siaran radio dan televisi serta film (audio visual media);
3. Lembaga atau asosiasi dalam masyarakat seperti masjid atau gereja tempat menyampaikan khotbah, dan juga lembaga pendidikan formal ataupun informal.<sup>16</sup>

#### **C. Tinjauan Umum Pemilih Pemula**

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 2008 Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 menyebutkan bahwa pemilih pemula adalah warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah warga

Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/ pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang- Undang Pemilu.<sup>17</sup>

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

kabupaten kepulauan meranti memiliki sebanyak 9 kecamatan yang terdiri dari 101 desa/kelurahan. Kecamatan yang memiliki jumlah desa/kelurahan terbanyak adalah kecamatan rangsang 17 desa/kelurahan dan rangsang barat dengan 16 desa/kelurahan dan kecamatan yang dengan jumlah terkecil adalah pulau merbau dan tebing tinggi timur dengan 7 desa/kelurahan. Dan jumlah penduduk terbanyak adalah di kecamatan tebing tinggi sebanyak 72.083 jiwa dan kecamatan teluk Belitung memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu 15.936 jiwa.

---

<sup>15</sup> Ellya Rosana, Partai Politik Dan Pembangunan Politik, *Jurnal Tapis Vol.8 No.1 Januari-Juni* 2012, Hlm. 137.

<sup>16</sup> Ibid, Hlm. 48

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008

**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN DAN**  
**PEMBAHASAN**

**A. Peran Partai Politik Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Di Kabupaten Kepulauan Meranti Sesuai Dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.**

Berikut tabel jumlah pemilih pemula yang memasuki umur 17 tahun dari tahun ke tahun selatpanjang kabupaten kepulauan meranti :<sup>18</sup>

**Tabel 1. 1 Jumlah Data Siswa SMA Kelas 3 Di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti**

Sekolah	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Jumlah Siswa
SMA N 1	271	228	246	244	989
SMA N 2	188	229	173	219	809
SMA N 3	77	42	31	27	177
SMK	168	191	224	198	781
MAN	156	198	172	154	676
TOTAL					3.272

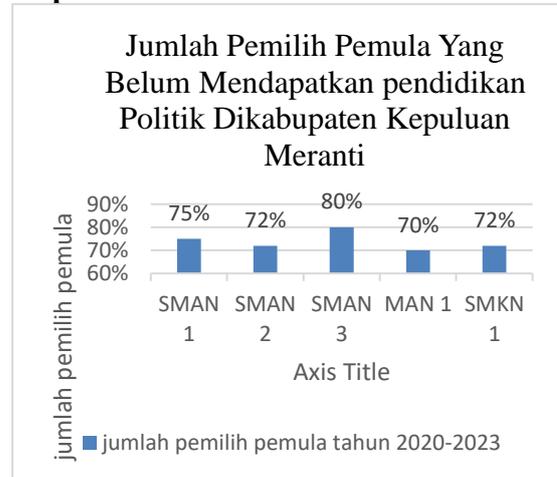
sumber: data dari SMAN Di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dilakukan kuesioner dengan membagikan link disosial media dengan target pemilih pemula yang sudah tamat SMA dari tahun 2019, artinya pemilih pemula siswa SMA kelas 3 ditahun 2020, 2021,2022 dan 2023, yang belum pernah ikut berpartisipasi dalam pemilu 2019 karna belum cukup umur, dan akan memilih pada tahun 2024 mendatang yang dimana target kuesioner ini adalah 200 pemilih pemula dari 3.272 pemilih pemula yang sama

<sup>18</sup> Jumlah Data Siswa SMA Kelas 3 Di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti

sekali belum menggunakan hak pilihnya.

**Gambar 4. 1 Grafik Jumlah Pemilih Pemula Yang Belum Mendapatkan Pendidikan Politik Di kabupaten Kepulauan Meranti**



Berdasarkan hasil data grafik kuisisioner diatas dari SMA N 1 TT adalah sebanyak 75%, di SMA N 2 TT sebanyak 72%, SMA N 3 TT adalah sebanyak 80%, MAN 1 sebanyak 70%, SMK N 1 sebanyak 72%.

**Gambar 4. 2 Diagram Pemilih Pemula**



Berdasarkan hasil kuisisioner dengan pemilih pemula, yang belum pernah mendapatkan Pendidikan politik dan tidak pernah diundang untuk mengikuti Pendidikan politik adalah 75% dan yang pernah mendapatakan Pendidikan politik dan diundang untuk mengikuti Pendidikan politik adalah 25%. Pendidikan politik

sangat penting bagi pemilih pemula selain untuk mengubah pola pikir masyarakat, pendidikan politik juga sangat berpengaruh terhadap partisipasi dalam pemilu mendatang agar menambah pengetahuan dan pemahaman sehingga para pemilih pemula nantinya tahu bagaimana ikut serta dalam Pemilu. Ada hak dan kewajiban, ada perintah dan larangan.

**Gambar 4.3 Diagram pemilih pemula menganggap Pendidikan politik penting**

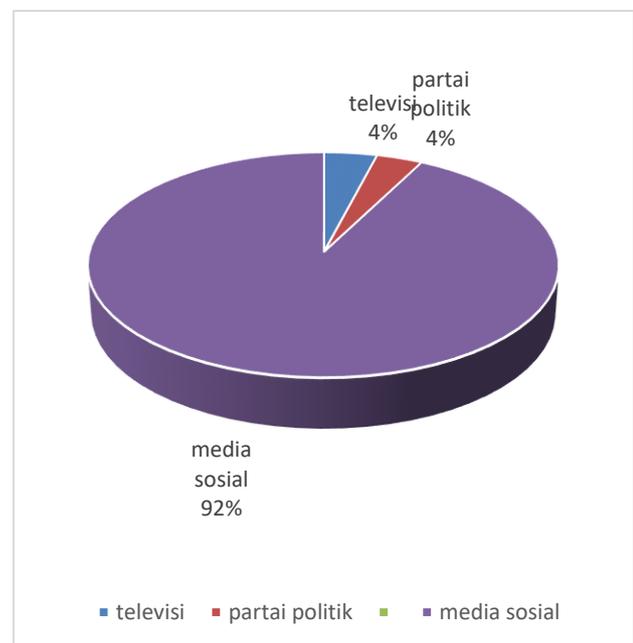


Bahwasanya hampir 96% pemilih pemula dikabupaten kepulauan meranti menganggap pendidikan politik sangat penting bagi mereka, yang artinya mereka butuh pendidikan politik. Namun dari hasil kuisisioner masih banyak yang belum mendapatkan pendidikan politik tersebut, padahal dengan adanya pendidikan pendidikan politik yang efektif bagi pemilih pemula, diharapkan akan terbentuk generasi muda yang berperan aktif dalam proses demokrasi dan mampu membuat keputusan yang cerdas dalam Pemilu sehingga dapat membawa perubahan positif bagi negara dan masyarakat.

Dilakukan wawancara dengan beberapa pemilih pemula, yang mengatakan bahwa pendidikan politik sangat penting agar menambah edukasi dan wawasan terkait partai politik ke tahap dalam pemilihan, dan juga penting karena jika mereka paham bagaimana politik itu berdiri dan bagaimana cara kerjanya

politik, apa lagi negara kita negara demokrasi tidak jauh dari perpolitikan. Itulah membuat mengapa pendidikan politik itu penting agar masyarakat mengerti bagaimana sistem politik itu berjalan, dan sebagai sarana untuk menambah ilmu dasar tentang politik, serta sebagai pemilih yang utama sangat wajib mengikuti pendidikan politik sejak dini, supaya suara pemilih pemula sangat layak dan berarti untuk untuk 5 tahun depan.<sup>19</sup>

**Gambar 4.4 diagram pemilih pemula memperoleh informasi politik saat ini:**



Berdasarkan diagram diatas 4% pemilih pemula memperoleh informasi politik saat ini dari televisi dan dari partai politik. Dan persentase tertinggi yang hampir mencapai 100% yaitu 92% pemilih pemula mendapatkan informasi politik saat ini melalui media sosial, Sebagai masyarakat pemilih pemula tentu tidak asing dengan sosial media, dan pasti memiliki akun media sosial dan dapat mengoperasikannya dengan mudah dalam memperoleh sesuatu dari media social termasuk memperoleh informasi politik

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan beberapa pemilih pemula

saat ini. Namun, media sosial merupakan tempat memperoleh informasi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan (hoax), untuk itu sebagai pemilih pemula yang masih minim dan labil pengetahuan politiknya harus lebih wasapada dan berhati-hati dalam memperoleh informasi di media sosial.

Oleh karna itu menjadi tanggung jawab besar bagi partai politik untuk memberikan Pendidikan politik kepada pemilih pemula yang masih minim pengetahuan terhadap partai politik, agar sebagai negara demokrasi yang memberikan kebebasan rakyat untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan aspirasi dan kepentingan rakyat sehingga nantinya bisa memberikan kesejahteraan kepada rakyat.

Berikut ini merupakan hasil wawancara bersama para kader partai politik yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mengetahui apakah Partai Politik di Meranti sudah menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik:

1) Partai demokrat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Fakhru Amrullah sebagai sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Meranti bahwasanya Partai Demokrat sudah melakukan Pendidikan Politik hanya setahun sekali bersama masyarakat dan pemilih pemula, Pendidikan Politik ini dilaksanakan dengan mengundang beberapa kalangan masyarakat dan pendidikan tersebut dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan juga mengundang beberapa narasumber dosen dari Universitas Riau. Menurut beliau Pendidikan politik bagi masyarakat sangat penting terutama bagi pemilih pemula mengingat anggaran partai

politik 60% adalah untuk pendidikan politik.<sup>20</sup>

2) Partai hanura

Berdasarkan hasil wawancara hasil wawancara penulis dengan Bapak Ramlan sebagai ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Kepulauan Meranti bahwasanya beliau mengatakan bahwa sudah melaksanakan pendidikan politik yang dilaksanakan satu tahaun sekali atau dua tahun sekali. namun, hanya diberikan kepada internal Partai Hanura dengan memberikan edukasi tentang peraturan dan undang-undang pemilu serta mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dan mendaftarkan diri untuk pemilih pemula yang baru pertama kali memilih.<sup>21</sup>

3) Partai PPP

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aristy Melisa sebagai wakil bendahara DPC Partai PAN Kabupaten Kepulauan Meranti bahwasanya Partai PAN Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan pendidikan politik lima tahun sekali ketika akan diadakannya pemilu dan diberikan kepada saksi. Beliau juga menyebutkan bahwasanya ada anggaran untuk pendidikan politik oleh partai politik<sup>22</sup>

4) Partai PKB

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Indra Putra sebagai sekretaris partai PKB Kabupaten Kepulauan Meranti bahwasanya partai PKB telah melakukan Pendidikan politik oleh ranting partai kedesa-desa dengan musyawarah yang dilaksanakan setahun sekali dan beliau juga mengatakan bahwa ada anggaran untuk pendidikan politik oleh Partai Politik.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Fakhru Amarullah Selaku Sekretaris Dpc Partai Demokrat

<sup>21</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Ramlan Selaku Ketua Dpc Partai Hanura.

<sup>22</sup> Hasil Wawancara Penulis Dengan Aristy Melisa Selaku Wakil Bendahara Dpc Partai Pan Kabupaten Kepulauan Meranti.

<sup>23</sup> Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Inra Saputra Selaku Skretaris Dpc Partai Pkb

### 5) Partai PKS

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Renaldi sebagai sekretaris DPC Partai PKS Kabupaten Kepulauan Meranti, bahwasanya Partai PKS mengadakan Pendidikan politik sebulan sekali dalam bentuk kajian keagamaan dikantor Partai PKS dan partai pks juga mendapatkan anggaran dana 1 suara Rp. 12.000.<sup>24</sup>

Dapat dikatakan Sebagian besar partai politik yang ada dikabupaten kepulauan meranti hanya berfokus memberikan Pendidikan politik kepada kader atau anggota internal partai tanpa melibatkan masyarakat terkhusus pemilih pemula yang dimana seharusnya masyarakat awam dan pemilih pemula yang masih labil dan minim pengetahuan politiknya yang harus diutamakan untuk menjadikan warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga tidak ada lagi masyarakat yang hanya dijadikan objek dalam lima tahun sekali, dan meminimalisir angka golongan putih (golput).

Rendahnya pendidikan politik di masyarakat akan berdampak pada partisipasi masyarakat yang rendah dalam memberikan kontribusinya terhadap kebijakan pemerintah, hal ini sangat dikhawatirkan karena dapat membentuk situasi kebijakan yang berjalan satu arah. Partisipasi politik dapat dijadikan sebagai salah satu parameter dalam penilaian tingkat demokrasi di sebuah negara. Semakin tinggi partisipasi politik dalam masyarakat dapat menunjukkan kondisi demokrasi yang berkualitas. Jika partai politik tidak memberikan pendidikan politik di masyarakat akan berdampak pada partisipasi masyarakat yang rendah dalam

memberikan kontribusinya terhadap kebijakan pemerintah, hal ini sangat dikhawatirkan karena dapat membentuk situasi kebijakan yang berjalan satu arah.

### **B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Di Kabupaten Kepulauan Meranti.**

Adapun penghambat partai politik dalam memberikan Pendidikan politik bagi pemilih pemula dikabupaten kepulauan meranti berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan kader partai, faktor faktor pendukung dan penghambat partai politik dalam memberikan Pendidikan politik di kabupaten kepulauan meranti adalah sebagai berikut :

#### 1. Partai Demokrat

Menurut partai demokrat Kabupaten Kepulauan Meranti pendukung memberikan Pendidikan politik adalah anggaran. Dan faktor penghambatnya yang pertama, masyarakat kurang antusias, dan takut dikatakan sebagai bagian dari anggota partai. Oleh karenanya menurut bapak fakhru Amarullah sangat penting memberikan Pendidikan politik kepada masyarakat agar masyarakat menjadi bijak dan tidak buta hukum. Dan jika masyarakat masih mengalami masa kegelapan dalam pendidikan politik, partai politik menjadi jenuh karena melihat Masyarakat yang alergi politik, itu merupakan kendala bagi partai politik untuk mengembangkan sayapnya.<sup>25</sup>

#### 2. Partai PPP

Menurut Partai PPP Kabupaten Kepulauan Meranti, Bapak Dedi Putra selaku ketua DPC menyebutkan bahwa faktor pendukung dalam memberikan Pendidikan politik adalah anggaran

<sup>24</sup> Hasil Wawancara Bersama Bapak Renaldi Selaku Sekretaris Dpc Partai Pks

<sup>25</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Fakhru Amrullah Selaku Sekretaris Dpc Partai Demokrat

dana. Dan faktor penghambat dalam memberikan Pendidikan politik adalah masyarakat terkhusus milenial kurang antusias sehingga harus mengubah sistem outbon.<sup>26</sup>

### 3. Partai PKS

Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak Renaldi selaku sekretaris Partai PKS Kabupaten Kepulauan Meranti menyebutkan bahwa tidak ada faktor hambatan dalam memberikan Pendidikan politik, karna jikalau pun dana untuk partai macet, maka para anggota partai PKS berkontribusi dalam penggalangan dana untuk melaksanakan kegiatan kajian yang dilakukan dalam 1 bulan sekali.<sup>27</sup>

### 4. Partai golkar

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Rahim selaku ketua partai golkar, menurut beliau tidak terdapat kendala dalam memberikan Pendidikan politik.

Dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam kegiatan memberikan Pendidikan politik oleh Partai Politik di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah yang pertama, ketidakpercayaannya masyarakat terhadap partai politik. Kedua, kurangnya antusias dari masyarakat. Dan dari beberapa Partai Politik mengatakan bahwa tidak ada hambatan, namun tidak juga terlaksana Pendidikan politik kepada masyarakat tersebut. Artinya bahwa kurangnya pemahaman pengurus partai politik dalam fungsi dan peranannya dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Sehingga harus dilakukan peninjauan kembali terhadap partai politik dalam memahami peran dan fungsinya sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Serta faktor pendukung dalam memberikan Pendidikan politi menurut beberapa partai politik adalah anggaran

dana.

Ditegaskan oleh beberapa partai yang diwawancarai bahwa partai politik memiliki anggaran dana untuk Pendidikan politik, bahkan partai demokrat menyebutkan 60% dana partai politik adalah untuk Pendidikan politik. Namun, hasil dari wawancara dan kuisisioner dengan pemilih pemula bahwa masih tinggi persentase pemilih pemula tidak mendapatkan serta memperoleh informasi pendidikan politik dari partai politik.

### C. Upaya Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Politik Dikabupaten Kepulauan Meranti

Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Dalam berdemokrasi, keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara adalah sebuah keharusan yang tidak bisa tidak. Berikut data partisipasi masyarakat dari KPU di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Berikut jumlah partisipasi masyarakat pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Kepulauan Meranti :

**Tabel 4. 1 partisipasi pemilu tahun 2019 kabupaten kepulauan meranti**

No	Jenis pemilihan	Jumlah	Jmlh pengguna hak pilih	%
1.	PPWP	147.942	106.181	71,77
2.	DPR	147.783	105.859	71,62
3.	DPD	147.780	105.907	71,66
4.	DPR PROV	147.843	105.869	71,65
5.	DPR Kab. (dopil I)	48.420	32.997	68,14

<sup>26</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Dedi Putra Selaku Ketua Doc Partai PPP

<sup>27</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Renaldi Selaku Sekreraris Dpc Partai Pks

6.	DPR Kab. (dapil II)	23.812	17.459	73,32
7.	DPR Kab. (dapil III)	40.317	29.560	73,31
8.	DPR Kab. (dapil IV)	35.198	25.668	72,92
	<b>TOTAL</b>	<b>147.747</b>	<b>105.684</b>	<b>71,53039</b>

**Sumber : data dari KPU Kabupaten Kepulauan Meranti**

Sumber : data dari KPU Kabupaten Kepulauan Meranti  
Data diatas menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perolehan suara pada pemilu 2019 dikabupaten kepulauan meranti masi rendah, dikarenakan pengetahuan dan kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam partisipasi, ini ditandai dengan data diatas bahwa pengguna hak pilih tidak suai dengan jumlah hak pilih, dimana angka yang seharusnya dengan yang terjadi masi jauh seharusnya total suara adalah 147.747 suara, namun yang menggunakan hak pilih suara hanya 105.684, artinya masi 71% tingkat partisipasi masyarakat. Masi kurang 29% masyarakat yang kurang sadar akan penggunaan hak pilih Masyarakat Dikabupaten Kepulauan Meranti.

Berikut beberapa langkah dalam meningkatkan pertisipasi masyarakat, dalam pemilu :<sup>28</sup>

1. Pendidikan Politik

Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari

berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan Partai Politik.

2. Memaksimalkan Fungsi Partai Politik

Upaya dalam meningkatkan partisipasi masyarkat dalam pemilu adalah dengan memberikan pendidikan politik dan memkasimalkan fungsi partai baik fungsi partai politik terhadap negara maupun fungsi partai politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik.

<sup>28</sup> Kpu Kabupaten Jember, 'Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu' <<https://Kab->

[Jember.Kpu.Go.Id/Berita/Baca/7989/Meningkatkan-Partisipasi-Masyarakat-Dalam-Pemilu](https://www.jember.kpu.go.id/Berita/Baca/7989/Meningkatkan-Partisipasi-Masyarakat-Dalam-Pemilu)>.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Oleh Partai Politik Dikabupaten Kepulauan Meranti sesuai Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Partai Politik dalam melaksanakan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 pada pasal 11 ayat (1) a dan pasal 13 (e) tentang pemberian pendidikan politik oleh Partai Politik kepada masyarakat terkhusus pemilih pemula dapat dikatakan belum berjalan secara optimal dan masih terdapat kekurangan berdasarkan hasil wawancara dan kuisioner bersama pemilih pemula yang ada dikabupaten kepulauan meranti. Dapat dikatakan Sebagian besar partai politik yang ada dikabupaten kepulauan meranti hanya berfokus memberikan Pendidikan politik kepada kader atau anggota internal partai tanpa melibatkan masyarakat terkhusus pemilih pemula yang dimana seharusnya masyarakat awam dan pemilih pemula yang masih labil dan minim pengetahuan politiknya Partai Politik memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
2. Faktor penghambat Partai Politik di Kabupaten Kepulauan Meranti dalam memberikan pendidikan politik adalah yang pertama, ketidakpercayaannya masyarakat terhadap Partai Politik, bahwa Ketika mengikuti acara Partai Politik masyarakat mengira akan dikatakan sebagai bagian dari anggota Partai Politik. Kedua, kurangnya antusias dari masyarakat. Dan dari beberapa Partai Politik mengatakan bahwa

tidak ada hambatan, namun tidak juga terlaksana pendidikan politik kepada masyarakat tersebut. Artinya bahwa kurangnya pemahaman pengurus Partai Politik dalam fungsi dan peranannya dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Serta faktor pendukung dalam memberikan Pendidikan politik menurut beberapa Partai Politik adalah anggaran dana.

3. Peningkatan partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum dalam proses memilih anggota legislatif dan eksekutif. Karena bagaimanapun masyarakat memiliki andil yang cukup besar dalam proses pemilihan umum dimana masyarakat sebagai pemilih yang menentukan dalam kemenangan dalam proses pemilihan umum tersebut, beberapa langkah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, dalam pemilu :

- a. Pendidikan Politik

Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan Partai Politik.

- b. Memaksimalkan Fungsi Partai Politik

Tujuan Partai Politik adalah untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan /mewujudkan program-program yang telah mereka susun sesuai dengan ideologi tertentu. Oleh karena itu maka untuk mencapai tujuannya tersebut maka Partai Politik memiliki fungsi sesuai Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik.

Partisipasi politik dapat dijadikan sebagai salah satu parameter dalam penilaian tingkat demokrasi di sebuah negara. Semakin tinggi partisipasi politik dalam masyarakat dapat menunjukkan kondisi demokrasi yang berkualitas. Oleh karena itu partai politik harus menjalankan fungsinya dengan sebaik baiknya dalam memberikan pendidikan politik agar meningkatkan partisipasi masyarakat dan menciptakan demokrasi yang berkualitas.

## **B. Saran**

1. Diharapkan adanya lembaga pengawasan Partai Politik dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya untuk memberikan Pendidikan politik, agar nantinya terkait peran dan tanggung jawab partai politik menjadi semakin kuat terutama dalam mencerdaskan masyarakat, khususnya pemilih pemula menjadi warga negara yang cerdas, sehingga nantinya terjamin suatu kepastian hukum dan aturan yang dirasakan oleh masyarakat dalam pendidikan politik.
2. Diharapkan Partai Politik dapat menerapkan aturan, tugas, fungsi dan wewenang Partai Politik dalam memberikan pendidikan politik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang diperbarui lagi menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.
3. Diharapkan adanya tindakan nyata dari Partai Politik dan pemerintah, sehingga

masyarakat tidak anti dengan politik dan tidak menjadi *trust issue* terhadap Partai Politik, serta partisipasi dari masyarakat mampu meningkat dalam merumuskan konsep ideal peran Partai Politik dalam memeberikan pendidikan politik, sehingga keberadaanya sangat penting agar nantinya dapat secara maksimal dalam menyelenggarakan Pendidikan politik.

4. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi dan informasi bagi penelitian selanjutnya untuk di Provinsi maupun Kabupaten, karna pada penelitian ini di Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai Kabupaten terpencil di Riau, ternyata pemilih pemulanya sangat membutuhkan dan antusias terhadap pendidikan politik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syamsuadi, *Februari* 2019, Menjadi Bijak Bagi Pemilih Pemula Berdasarkan Informasi Dari Media Sosial Di Kabupaten Kepulauan Meranti, Jurnal Pengabdian Masyarakat *Multidisiplin Volume 2 No. 2*
- Data Sekolah Menengah Atas Diselatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti, anak usia 17 tahun (kelas 3) dari tahun 2019-2023
- Dewi Andriany, 2015, "Seminar Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (Snema) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang", Available Online At <http://fe.unp.ac.id/> Book Of Proceedings Published By (C), SNEMA, Padang-Indonesia.
- Ellya Rosana, *Januari-Juni* 2012. Partai Politik Dan Pembangunan Politik, *Jurnal Tapis Vol.8 No.1*
- Hasil Wawancara Bersama Bapak Renaldi Selaku Sekretaris Dpc Partai Pks
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Fakhrul Amarullah Selaku Sekretaris Dpc Partai Demokrat
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Ramlan Selaku Ketua Dpc Partai Hanura.
- Hasil wawancara dengan beberapa pemilih pemula
- Hasil Wawancara Penulis Dengan Aristy Melisa Selaku Wakil Bendahara Dpc Partai Pan Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Dedi Putra Selaku Ketua Doc Partai PPP
- Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Fakhrul Amrullah Selaku Sekretaris Dpc Partai Demokrat
- Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Inra Saputra Selaku Skretaris Dpc Partai Pkb
- Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Renaldi Selaku Sekreraris Dpc Partai Pks
- Iyep Hermawan Dan Candra, 2020, Implementasi Pendidikan Politik Pada Partai Politik Di Indonesia, *Jurnal.Unsur.Ac.Id.*
- Jumlah Data Siswa SMA Kelas 3 Di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti
- Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Kepulauan Meranti (Jiwa), 2021-2023', *Badan Pusat Statistik*, 2023  
<<https://merantikab.bps.go.id/indicator/12/261/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-di-kabupaten-kepulauan-meranti.html>>.
- Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Kepulauan Meranti (Jiwa), 2021-2023', *Badan Pusat Statistik*, 2023  
<<https://merantikab.bps.go.id/indicator/12/261/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-di-kabupaten-kepulauan-meranti.html>>.
- Kpu Kabupaten Jember, 'Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu' <<https://kab-jember.kpu.go.id/berita/baca/7989/tingkatkan-partisipasi-masyarakat-dalam-pemilu>>.
- Ppid Bapedda Prov. Jateng, 'Partai Sebagai Badan Publik', *Ppid Bappeda Provinsi Jawa Tengah*  
<<https://ppid.bappedda.jatengprov.go.id/partai-sebagai-badan-publik/>>.
- Ryan, Cooper, And Tauer, 2013'No Title No Title No Title', *Paper Knowledge . Toward A Media History Of Documents*,
- Undang – Undang Nomor. 02 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008
- Vina Akfa Dyani,2017,"Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte" Lex Reinansace, Yogja,VOL. 2 No. 1, Januari 2017.
- Zainuddin,2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta